

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Makassar

Rezky Sartika Dewi ¹,

Email : rezkydewi@gmail.com

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama author : Rezky Sartika Dewi

E-mail : rezkydewi@gmail.com

Received : 30 Januari 2023, Revised: 5 Februari 2022, Accepted: 25 Februari 2023

Published : 26 Maret 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kota Makassar.

Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan teknik simple random sampling. Populasinya adalah seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sejumlah 59 SKPD, sedangkan sampel yang diambil berjumlah 54 responden. Hasil kuesioner tersebut telah diujivaliditas dan reliabilitasnya, juga diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas dan asumsi heterokedastisitasnya. Metode analisis data menggunakan teknik regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena menunjukkan hasil uji hipotesis yang positif dan signifikan. Ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah.

Abstract: *This study aimed to determine whether there is positive and significant correlation between the area of financial control and accountability of financial management of local government performance in Makassar city government.*

Collecting data using primary data obtained from questionnaires using simple random sampling technique . The population is all SKPD within the scope of the Government of Makassar number 59 on education , while the samples taken are 54 respondents . The results of the questionnaire have diujivaliditas and reliability , also tested the assumption of normality assumptions of classical form and assumptions heterokedastisitasnya . Methods of data analysis using multiple linear regression techniques .

The results showed that the hypothesis is accepted because the test results were positive and significant hypotheses . This means that the area of financial control and accountability of financial management and significant positive effect on the performance of local government

Keywords: *Regions Financial Supervision, Financial Management Accountability, Local Government Performance.*

I. PENDAHULUAN

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Pemerintah kota Makassar salah satu pemerintah daerah yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu yang ingin dibahas dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan daerah di lingkup pemerintah daerah kota Makassar sudah akuntabel dan transparan.

Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Mahsun (2006) mengatakan bahwa kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan termasuk juga pemerintah daerah kota Makassar. Untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem Perencanaan yang sistematis, terencana dan terukur. Penyusunan perencanaan tersebut juga tidak terlepas dari wujud pertanggung jawaban publik.

Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara abik, perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama - sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2009).

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah maka pemerintah daerah Kota Makassar harus sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan

daerah dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapi sistem.

Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Rahmanurrasjid (2008:146-147) mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat. Ismiarti (2013:90-91) menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja.

Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir (2007) mengatakan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik. Berbagai argumen di atas memberikan pemahaman betapa pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam peningkatan kinerja pemerintahan. Akan tetapi hal yang terjadi pada Pemerintah Kota Makassar Menurut asisten I Pemkot Makassar M Sabri menyatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi laporan kemajuan kerja SKPD Kota Makassar triwulan 1 tahun 2016 banyak kinerja buruk. SKPD yang ada dikota Makassar yang memiliki kinerja kategori baik sebagai 25%, kategori cukup 20% dan SKPD kategori kinerja sangat kurang 55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah sangat rendah. (www.rakyatsulsel.com)

Peneliti sebelumnya Budi dkk (2015) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan hasil penelitian pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng, akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng, transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng. Auditya dkk (2013) tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil penelitian bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah.

II. LITERATUR REVIEW

1. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan – aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Budi dkk, 2015).

Pengawasan menurut keputusan presiden No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 1 ayat 6 menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Sumarsono, 2010). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggung jawaban APBD.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan. Menurut Sumarsono, (2010:184) indikator pengawasan yang harus dilakukan oleh dewan, yaitu: (a) Pengawasan saat penyusunan, (b) Pengawasan saat pengesahan, (c) Pengawasan saat pelaksanaan, (d) Pengawasan saat pertanggung jawaban anggaran

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Moehariono (2014) akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiscal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi Moehariono (2014)

Menurut Moehariono (2014) ukuran indikator akuntabilitas dapat dikelompokkan kedalam 6 (enam) kategori berikut ini. Namun demikian, organisasi tertentu dapat mengembangkan kategori masing - masing yang sesuai dengan misinya, yaitu sebagai berikut : (a) Efektif, (b) Efisien, (c) Kualitas, (d) Ketetapan waktu, (e) Keselamatan

3. Kinerja Pemerintah Daerah

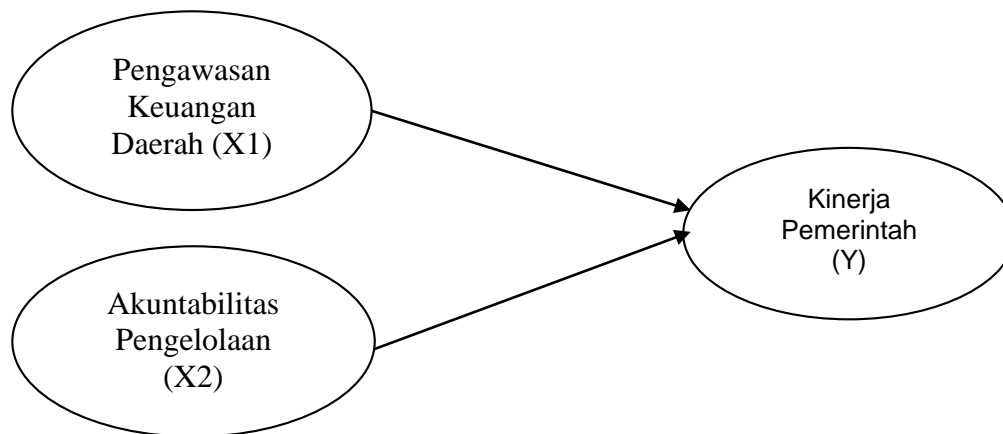
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant*, *unambiguous*, *cost-effective*, dan *simple*, serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Sumarsono, 2010).

Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian *organisasi* dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramandei, 2009). Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Menurut Mahsun (2006: 77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu: (a) Indikator masukan/Input, (b) Indikator proses/Process, (c) Indikator keluaran/Output, (d) Indikator hasil/Outcomes.

Kerangka Konsep



Gambar 1 : Kerangka Konsep

Hipotesis :

- H₁ : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
- H₂ : Akuntabilitas penegelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

III. METODOLOGI

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan logika/penalaran deduktif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2014), penelitian asosiatif kausal dilakukan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat.

Penelitian dilakukan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. (Sugiyono, 2014: 122). Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Jumlah sampel dihitung dengan rumus Taro Tamane :

$$n = \frac{N}{N(d^2)+1} \quad n = \frac{118}{118(0,1^2)+1} = 54,12 = 54 \text{ responden}$$

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
- a = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X1 = Pengawasan Keuangan Daerah
- X2 = Akuntabilitas pengelolaan
- e = Error (Kesalahan Residual)

Hasil

Analisis Deskriptif

Analisis data secara deskriptif dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Analisis Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Y	33,58	2,604	50
X1	33,24	2,803	50
X2	25,98	2,075	50

Sumber: Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata pengawasan keuangan daerah sebesar 33,24, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah rata-rata sebesar 25,98 dan kinerja pemerintah daerah rata-rata sebesar 33,58.

Uji hipotesis

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Uji Hipotesis

Uraian	Koofisien Regresi	t- hitung	p-value (sig)
Constant	3,436	1,819	0,075
Pengawasan keuangan daerah (X1)	0,861	18,074	0,000
Akuntabilitas pengelolaan (X2)	1,215	5,432	0,000
Dependen Variabel : Kinerja pemerintah daerah (Y)	-	-	-

Sumber : Data diolah tahun 2022

Uji t dapat dilihat pada tabel diatas yaitu pada nilai t dengan nilai $df = n - k - 1 = 50 - 2 - 1 = 47$ maka t_{tabel} diperoleh yaitu 2,011. Pada tabel 4.11 nilai pengawasan keuangan daerah pada kolom t, nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $18,074 > 2,011$ maka H_a diterima berarti secara parsial pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kolom t, $5,432 > 2,011$ maka H_a diterima berarti secara parsial akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil perhitungan ini, dapat pula diperoleh bahwa antara pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah terdapat pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$). Nilai signifikan diperoleh sebesar 0,00 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah terdapat pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$). Nilai signifikan diperoleh sebesar 0,00.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Menurut Ghozali (2013:97) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Adapun hasil uji determinasi *Adjusted R²*. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) atau *R Square* sebesar 0.890. Berdasarkan nilai *R Square* ini dapat dikatakan bahwa sebesar 89,0% variabel kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan kinerja

pemerintah daerah yang tidak dapat dijelaskan oleh pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di jelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 11,0% (100% - 89,0%). Demikian juga jika dilihat dari nilai adjust R^2 yang disesuaikan terhadap variabel independen yang ada. Berarti 88,5% variabel independen dapat menjelaskan variabel terikatnya sedangkan sisanya 11,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

IV. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Makassar. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 0.861 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0.00. Secara lebih tepat hasil ini didukung oleh hasil perhitungan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh nilai t_{hitung} 18,074 > 2,011 t_{tabel} . Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Makassar. Sehingga dengan kata lain, hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi dkk (2015), Mengindikasikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja pemerintah daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah sejalan dengan kinerja pemerintah daerah. Jika pengawasan keuangan daerah tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, demikian sebaliknya jika pengawasan keuangan daerah rendah maka kinerja pemerintah daerah akan menurun. Berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki peranan yang penting dalam kinerja pemerintah daerah.

2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kota makassar. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 1,215 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0.00. Secara lebih tepat hasil ini didukung oleh hasil perhitungan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh nilai t_{hitung} 5,432 > 2,011 t_{tabel} . Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kota makassar. Sehingga dengan kata lain, hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi dkk (2015), Mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan kinerja pemerintah daerah, Jika akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, demikian sebaliknya jika akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah rendah maka kinerja pemerintah daerah akan menurun. Berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki peranan yang penting dalam kinerja pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan. (a) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kota Makassar, (b) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kota Makassar.

Keterbatasan. Keterbatasan penelitian Dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kinerja pemerintah daerah yang dianggap konstan, ada beberapa variabel lain yang tidak diamati oleh peneliti yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

REFERENSI

- Auditya, Lucy dkk, (2013). *Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah daerah.*Jurnal Fairness Vol.3 No.1.
- Akbar, B. (2012). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah.*Artikel.Fordfoundation.Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.*(Online).(diakses 15 Mei 2016) tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Angreani Rini. (2011). *Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 di Kabupaten Pinrang.* Makassar.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Budi, Made Sastra Wiguna dkk, (2015). *Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten buleleng.*E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Vol.3 No.1.
- Dessler, Gary. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Index
- Erlina dkk.(2015). *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

-
- Ghozali, Imam, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul, (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YPKN.
- Kuncoro, Mudrajat, (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3, Jakarta, Erlangga
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi)*. Depok, Rajagrafindo Persada.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintah, Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM. Yogyakarta, Edisi Pertama.
- Pemerintah Kota Makassar, Melalui www.rakysulse.com (tanggal Akses : 26 Mei 2016).
- Pemerintah RI, (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, (2003). Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- _____, (2004). Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- _____, (2004). Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____, (2014). Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____, (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2012 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- _____, (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

-
- _____, (2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2007 *Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- _____, (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan kedua. Belanja Daerah*
- Rahmanurrasjid, Amin. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Sekaran, Uma, (2006). *Research Methods For Business*. Jakarta, Salemba Empat,
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabeta.
- Sunyoto, Danang, (2011). *Dasar – Dasar Statistika Untuk Ekonomi*. Yogyakarta, CAPS.
- Wiranto, Tatang. (2012). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*. (online). (diakses tanggal 25 Mei 2016). Tersedia di World Wide Web: <http://www.depkominfo.go.id>.